



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Advokasi Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia

Sesi 4

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Fasilitator:

Prof. dr. Hadi Pratomo, MPH, Dr.PH



Advokasi Kesehatan
Program S1 Kesehatan Masyarakat



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia
EST. 1849

Advokasi Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia

Sesi 4

ANGGARAN: Hakekat dan Fungsi dan Advokasi Anggaran Publik (Telaah Kebijakan Publik)

Sumber:

Sri Mastuti & Dian Kartikasari, **Panduan Advokasi Anggaran**, Jakarta,
FITRA & KPI, 2001.



Advokasi Kesehatan

Program S1 Kesehatan Masyarakat

Pengertian Anggaran Negara

- Perkiraan penerimaan & pengeluaran pada 1 periode mendatang (Due & Baswir)
- Alat mencapai tujuan dlm melayani masy, berorientasi kesra (Abedian & Samuel)
- Alat pemerintah utk merenc penggunaan uang dlm pelayanan prog (Abedian)
- Kombinasi perenc pengeluaran publik & pajak di masa mendatang, dari mana sumbernya, apa kegunaannya (Samuel)

Anggaran Negara

- Merupakan kegiatan perencanaan, pernyataan ttg penerimaan & pengeluaran, pada periode tertentu, kini dan mendatang.
- Wujud amanat rakyat kepada Eksekutif & Legislatif demi meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kpd masyarakat.
- Hak & tanggung jawab kedua pihak.
- Berasal dari dan untuk rakyat.

Hakekat & Fungsi Anggaran

- Blue print pembangunan di masa mendatang.
- Cerminan amanat rakyat kepada Legislatif yg diteruskan kepada Eksekutif utk meningkatkan kehidupan dlm kerangka perbaikan di masa mendatang (Timbul Pudjianto).
- Kebijakannya terkait pajak & retribusi, berpengaruh kpd kesra, tergantung distribusi alokasi anggaran (persentase bagi publik & kepent masy)

4 Fungsi Anggaran:

1. Priority setting thd kebijakan pemerintah melalui penetapan alokasi anggaran.
2. Cerminan rencana besar pendapatan & pengeluaran.
3. Menciptakan stabilitas sosek sekaligus pertumbuhan ekonomi.
4. Menetapkan tujuan besaran pendapatan maupun pengeluaran berdasarkan beban kerja & harga satuan

Format APBN

PENDAPATAN

- **Penerimaan Dalam Negeri**
 - Pajak Dalam Negeri
 - Pajak dari Perdagangan Internasional
- **Penerimaan Bukan Pajak**
 - Penerimaan SDA
 - Bagian Laba BUMN
 - Hibah dan Pinjaman Luar Negeri

BELANJA

- **Belanja Negara**
 - Pengeluaran Rutin
 - Pengeluaran Pembangunan
- **Dana Perimbangan**
 - Dana Bagi Hasil
 - Dana Alokasi Umum (DAU)
 - Dana Alokasi Khusus (DAK)

Format APBD

Pendapatan

- Sisa Pendapatan Tahun Lalu
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): pajak, retribusi, laba usaha daerah, dsb
- Pendapatan dari Pemberian Pemerintah yg Lebih Tinggi

Belanja

- Rutin: blnj pegawai, barang, perawatan, perjalanan, dsb.
- Belanja Pembangunan: sektor, sub sektor

Tahapan Penyusunan & Pembahasan Anggaran

- Musbang Tk. Kelurahan (Mei-Jun)
- Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) Tk. Kecamatan (Jul)
- Rakorbang Kab/Kota (Jul-Agst)
- Susun & Drafting APBD (Sept)
- Pertemuan Panmus (Pemda & DPRD) (Okt)
- Pembahasan di DPRD (Nov-Des)
- Pemberlakuan Perda APBD (Jan-Des)
- Perubahan Anggaran (Jul-Sept thn berikut)
- Penyampaian Nota Perhitungan (Jan-Mar thn berikut)

Dasar Hukum APBN

- UUD 1945: pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2, pasal 3 ayat 1 & 5 (UUD 45 perubahan th 2000).
- Tap MPR No. IV/1999 ttg GBHN 1999-2004
- UU No. 25/1999 ttg Perimbangan Keu Pst & Daerah
- UU No. 25/2000 ttg Propenas 2000-2004
- UU NO. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah

Dasar Hukum APBD

- UU sbg dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan
- UU sbg dasar Penyusunan Anggaran Belanja
- PP pengelolaan pertanggungjwbn keu daer
- Permen ttg teknik menyusun/ membahas APBD
- Kepmen ttg perubahan/ penyempurnaan APBD

- Penyusunan/ penetapan APBD menurut PP 105/2000 sejalan dgn semangat Otonomi Daerah (Otonomi Daerah) diatur dlm UU 22&25/1999.
- PP 105/2000 menjadi dasar hukum yg kuat dlm menyusun APBD, dan menyatakan bhw APBD merup renc keu selama 1 tahun berjalan, ditetapkan melalui Perda.

Penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip

- Keadilan & Kepatutan
- Rasional & Terukur
- Pendekatan Kinerja
- Perhitungan Struktur Anggaran
- Prosedur Penetapan APBD
- Dokumen Publik

TUJUAN ADVOKASI ANGGARAN

- Merubah kebijakan yg terkait anggaran utk mewujudkan kebijakan penganggaran yg lebih baik.
- Untuk meminimalisir penyimpangan dalam proses penganggaran.

Isu-Isu:

- Kebijakan Alokasi Anggaran: rasional, sesuai kebutuhan
- Kebijakan struktur anggaran
- Kebijakan pengelolaan sumber penerimaan budgeter & non-budgeter
- Kebijakan tender proyek
- Kebijakan kontrol & akuntabilitas anggaran.

Permasalahan dlm Anggaran & Proses Penganggaran

- Tahap Penyusunan Anggaran
- Tahap Pembahasan Anggaran
- Tahap Implementasi Anggaran
- Tahap Evaluasi Anggaran

Peluang utk Advokasi Anggaran

- Advokasi Saat Draft Anggaran Disusun.
- Advokasi Saat Pembahasan Anggaran
- Advokasi Saat Implementasi Anggaran
- Advokasi Saat Evaluasi Anggaran

LSM untuk Advokasi Anggaran

- LSM ttg Advokasi Anggaran
- KOTA= Koalisi Ornop utk Transparansi Anggaran.
- Didirikan oleh LSM FITRA (Forum Indonesia utk Trans Anggaran) & UPC (Urban Poor Consortium) tgl 8 Des 2000.
- Utk Advokasi Alokasi Anggaran bagi Kaum Miskin kpd DPRD DKI, 2000-2001

Strategi KOTA

- Kombinasi Proaktif & Reaktif (kooperatif & konfrontatif)
- Pembagian Tugas antar anggota Koalisi:
 1. Pemasok Kajian & Lobby
 2. Analisis Anggaran Komprehensif
 3. Analisis utk Kepentingan Masy Miskin
 4. Analisis utk Kepentingan Keadilan Gender
 5. Pressure Massa
 6. Penggalangan Dana
 7. Legal Aspect

Evaluasi Kegiatan KOTA

- Timing sdh lewat
- Belum ada aturan main, konflik antar anggota
- Target kegiatan melebar.
- Strategi Advokasi dari tiap anggota berbeda, perlu disinkronkan.

MENJAMIN KEBERLANJUTAN ADVOKASI

- Advokasi harus Kontinyu
- Menjamin Keberlanjutan Advokasi:
 1. Sumber Daya
 2. Pertahankan Integritas
 3. Pertahankan Koalisi
 4. Akses terhadap Informasi

DISKUSI KELOMPOK (1):

1. Pelajari struktur org, tugas dan fungsi DPR/ DPRD lokasi anda (berdasar webb)
 - a. Komposisi, Fraksi, Komisi dan lingkup tugas, identitas anggota dan akses
 - b. Produk hukum yg telah dihasilkan dan sedang digarap (rencana yad)
 - c. Jadwal kerja dan kpn masukan masy?

DISKUSI KELOMPOK (2):

2. Anggaran

- a. Pelajari dan uraikan siklus anggaran di lokasi yang anda pilih, jelaskan dengan skema
- b. APBD 2011, 2012, 2013 (3 th) dan telaah singkat prioritas
- c. Lakukan telaah aspek keadilan dan kepatutan

DISKUSI KELOMPOK (3):

3. Advokasi anggaran

- a. Bagaimana proses penganggaran dari isu yang kelompok pilih?
- b. Kelompok memilih advokasi anggaran yang tahap mana? Kenapa tahap tersebut yg dipilih? Langkah apa yg akan diambil?
- c. Presentasi klp: maks 10 slaid



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia
EST. 1849

Advokasi Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia

Sesi 4

Analisis Anggaran dan Kebijakan Daerah : Contoh Aplikasi Kab Lebak



Advokasi Kesehatan

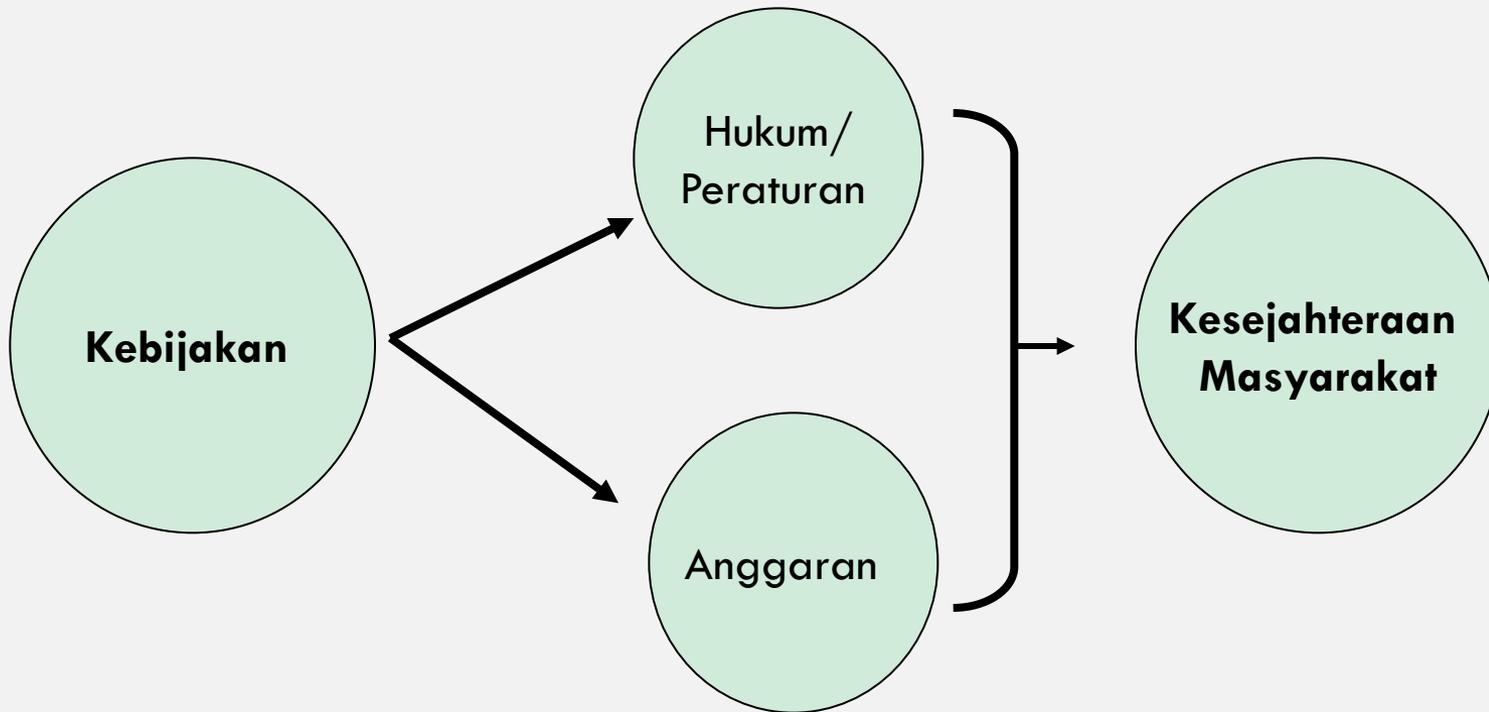
Program S1 Kesehatan Masyarakat

Pengertian Kebijakan

- Apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Thomas R.Dye).
- Hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya (Robert Eyestone).
- Sejumlah aktivitas pemerintah, baik langsung atau melalui perantara, yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan warga negara
- (B. Guy Peters).

ANGGARAN

Suatu pedoman yang akan dilaksanakan pemerintah yang meliputi perencanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam satuan rupiah yang disusun berdasarkan klasifikasi anggaran secara sistematis untuk suatu periode tertentu.



ADVOKASI ANGGARAN

Serangkaian upaya untuk mempengaruhi kebijakan penyusunan anggaran agar lebih berpihak pada kepentingan publik/masyarakat luas

STRATEGI DAN LANGKAH-LANGKAH ADVOKASI ANGGARAN

- 1. Menentukan Isu Bersama**
- 2. Menentukan Maksud & Tujuan**
- 3. Mengenali Kelompok Sasaran**
- 4. Menggalang Dukungan**
- 5. Mengembangkan Pesan**
- 6. Menentukan Media**
- 7. Menggalang Sumberdaya**
- 8. Implementasi Rencana Aksi**
- 9. Memproses Data & Informasi**
- 10. Monitoring & Evaluasi**

Kerangka Analisis Anggaran dan Kebijakan Daerah

A. Analisa Prosedur Penyusunan Anggaran

- Analisa Prioritas Permasalahan Daerah dalam RKPD dan KUA
- Analisa KUA dan Pagu Anggaran

B. Analisis Pendapatan

- Analisis Pendapatan Ilegal
- Analisis Pendapatan yang tidak sesuai dengan norma
- Analisis Potensi pajak/Restribusi

C. Analisis Umum Belanja Anggaran

- Analisis kelayakan belanja program/kegiatan
- Analisis kesesuaian program dengan perundangan
- Analisis Kebijakan belanja Daerah dengan norma-norma

D. Alokasi Anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin

- Analisis Potensi Inefisiensi Anggaran
- Identifikasi inefisiensi dari berbagai sumber anggaran
- Rekapitulasi potensi inefisiensi
- Analisis sasaran realokasi

Studi Kasus

Permasalahan di tahun 2008	Agenda dan Prioritas Pembangunan 2008 di PPAS	Agenda dan Prioritas Pembangunan 2008 di KUA	Keterangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan Jumlah Desa Tertinggal 2. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Pertanian dalam arti luas 3. Meningkatkan Dukungan infrastruktur dalam arti luas 4. Meningkatkan Investasi dan produktivitas 5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan 6. Mendorong peran serta masyarakat luas dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi serta Mempercepat Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat 7. Meningkatkan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana serta pemberantasan penyakit menular 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan Jumlah Desa Tertinggal 2. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Pertanian dalam arti luas 3. Meningkatkan Dukungan infrastruktur dalam arti luas 4. Meningkatkan Investasi dan produktivitas 5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan 6. Mendorong peran serta masyarakat luas dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi serta Mempercepat Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat 7. Meningkatkan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana serta pemberantasan penyakit menula 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan Jumlah Desa Tertinggal 2. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Pertanian dalam arti luas 3. Meningkatkan Dukungan infrastruktur dalam arti luas 4. Meningkatkan Investasi dan produktivitas 5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan 6. Mendorong peran serta masyarakat luas dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi serta Mempercepat Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat 7. Meningkatkan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana serta pemberantasan penyakit menular 	<p>Apresiasi terhadap Komitmen Pemerintah Daerah dalam menuntaskan isu permasalahan yang terdapat dalam RKPD dan KUA sehingga isu masalah tertuang dalam isu permasalahan pada Plafon Anggaran (PPA)</p>

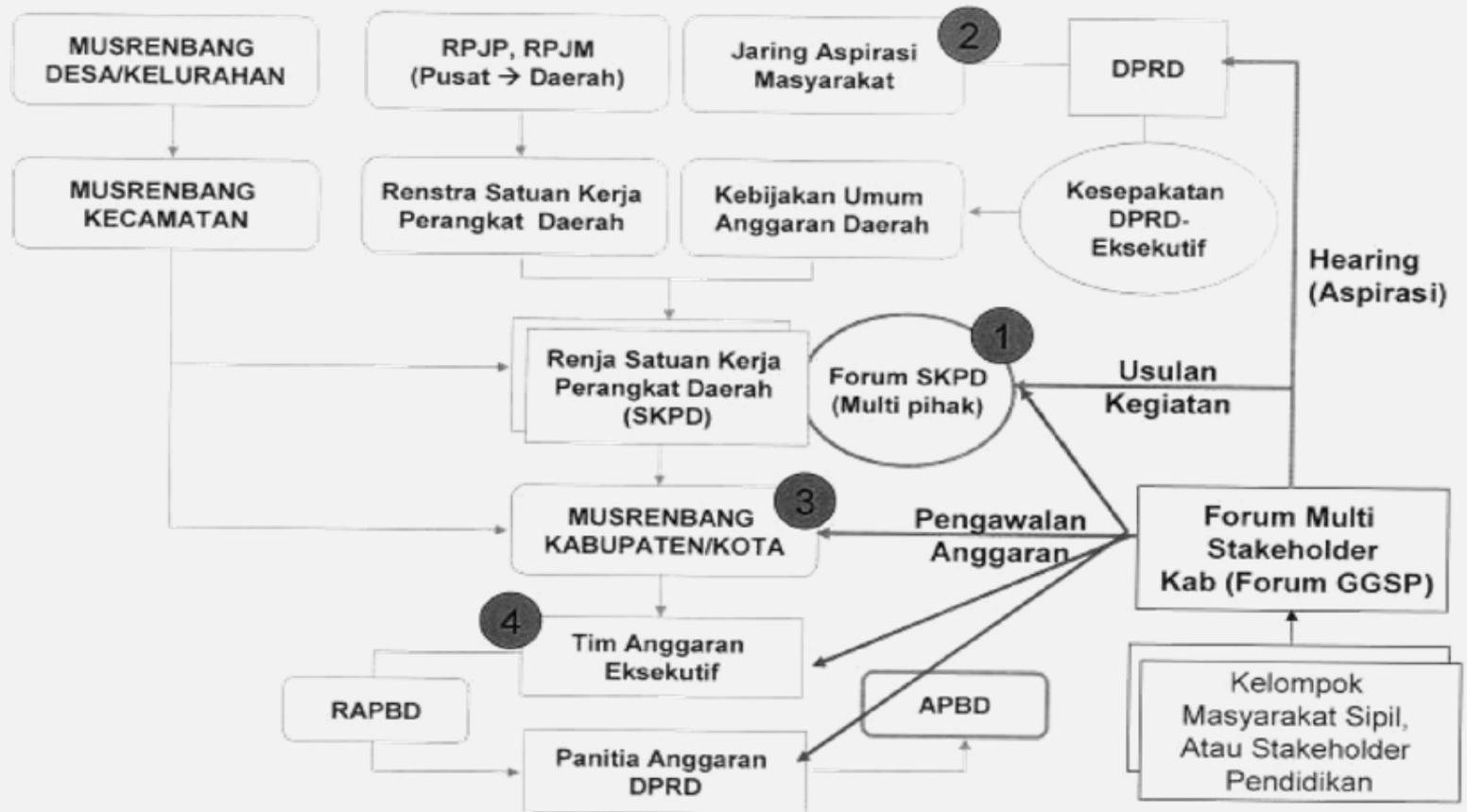
Studi Analisa...(1)

No	Kode Rekening	Belanja dengan indikasi mark-up	Nilai yang dianggarkan	Nilai Menurut Standar (SHB)	Kelebihan (Mark-up)	Keterangan	
1	5.2.1.0 1.04	Honorarium Bulanan Pelaksana Anggaran					Dinas Pendidikan Kab. Lebak .Program Pembinaan Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah Kegiatan Rehabilitasi dan Gedung MI Total, besaran honor tersebut tidak sesuai dengan SHB Standar Harga Kep.Bup 500/Kep.319/Prog/2007 hal 1-3 bahwa kegiatan > 2,5 M maka honorarium bagi pelaksana adalah : 1. Kuasa pengguna anggaran Rp. 460.000 2).PPTK Rp. 400.000 3). Bendahara pembantu Rp. 380.000 4). Staf Adm Bendhr Rp. 275.000 5). Staf Teknis Pelaksana Teknis Rp. 275.000. Keseluruhan Markup untuk Honorarium PNS Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Gedung MI adalah Sebesar Rp. 3.360.000
		Kuasa Pengguna Anggaran) 680.000 x 4 Bln	2,720,000	1,840,000	880,000		
		Pejabat Pelaksana Teknis Anggaran 600.000 x 4 Bln	2,400,000	1,600,000	800,000		
		Bendahara Pengeluaran Pembantu 550.000 x 4 Bln	2,200,000	1,520,000	680,000		
		Staf Adm Bendahara Pengeluaran Pembantu 400.000 x 4 Bln	1,600,000	1,100,000	500,000		
		Staf Teknis Pelaksana Teknis Kegiatan 400.000 x 4 Bln	1,600,000	1,100,000	500,000		

Studi Analisa...(2)

2	5.2.1.01.03	Honorarium Bulanan kegiatan Pengadaan Obat-Obatan				
		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 Bln @ 400,000	4,800,000	4,500,000	300,000	Dinas kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit, kegiatan ini senilai 2 M dalam Standar Harga Kep.Bup 500/Kep.319/Prog/2007 hal 2-3 Nilai diatas 1M < 2,5M rincian sebagai berikut : PPTK Rp. 375.000/hari, Bendahara Peng Pemb Rp. 350.000/hr, Staf Adm Bend. Peng. Pem . Rp. 250.000/hr, Staf PPTK Rp. 250.000. Sehingga Nilai Mark-up 2.100.000
		Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bln @ 400,000	4,800,000	4,200,000	600,000	
		Staf Administrasi Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bln @ 300,000	3,600,000	3,000,000	600,000	
		Staf Teknis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 Bln @ 300,000. tidak sesuai dengan Perbup	3,600,000	3,000,000	600,000	
Total				5,460,000		

SKEMA ADVOKASI ANGGARAN



Diskusi Kelompok:

- Latihan analisis anggaran KIBBLA
- Data anggaran dan petunjuk analisis



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia
EST. 1849

Advokasi Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia

Sesi 4

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

SEKIAN

DAN

TERIMA KASIH



Advokasi Kesehatan
Program S1 Kesehatan Masyarakat